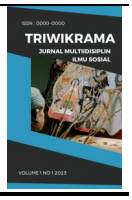
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 7, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SMP NEGERI 48 SURABAYA

Nuarsada Yustanika, Faiza Firnanda, Chintya Eka Permatasari, Nifyani Fellyla Bimantari

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received November, 2026
Revised November, 2026
Accepted November, 2026
Available online November, 2026

nuarsada.23297@mhs.unesa.ac.id,
faiza.23335@mhs.unesa.ac.id,
chintya.23372@mhs.unesa.ac.id,
nifyani.23373@mhs.unesa.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusi dalam pemenuhan hak pendidikan siswa berkebutuhan khusus di SMP Negeri 48 Surabaya. Penyelenggaraan pendidikan inklusi masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan Guru Pendamping Khusus (GPK), sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, serta dukungan pembiayaan. Meskipun demikian, sekolah telah mengembangkan program Sejenak dan SEBESTI sebagai bentuk layanan bagi siswa berkebutuhan khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori implementasi kebijakan George
C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan, bentuk layanan pendidikan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak pendidikan siswa berkebutuhan khusus.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan Inklusi, Hak Pendidikan, Siswa Berkebutuhan Khusus.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of inclusive education policies in fulfilling the educational rights of students with special needs at SMP Negeri 48 Surabaya. The implementation of inclusive education still faces several challenges, including the limited availability of Special Education Teachers (SET), inadequate disability-friendly facilities, and limited financial support. Nevertheless, the school has developed the Sejenak and SEBESTI programs to support students with special needs. This study employs a descriptive qualitative approach based on George C. Edward III's policy implementation theory, which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Informants are selected through purposive sampling, while data are collected through interviews, observations, documentation, and literature studies. This study focuses on policy implementation, educational services, and supporting and inhibiting factors in fulfilling the educational rights of students with special needs.

Keywords: Policy Implementation, Inclusive Education, Educational Rights, Students with Special Needs.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses untuk mengembangkan karakter, kemampuan berpikir, dan kondisi fisik anak guna mencapai kehidupan yang lebih baik dan harmonis dengan lingkungan alam serta masyarakat (Asrianti, 2025). Pendidikan menjadi hak untuk seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakangnya, tanpa membedakan ras, fisik dan sebagainya, sehingga hak-hak pendidikan bagi anak harus diperoleh dan tidak ada pengecualian bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu (Sulfiani dan Sumarni, 2025). Melalui proses pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan teoretis, melainkan juga mengasah kemampuan berpikir kritis, keterampilan sosial, dan kesadaran moral yang diperlukan untuk berinteraksi serta memberikan kontribusi dalam lingkungan sosialnya (Manalu, 2025). Pemenuhan hak pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus menjadi hal penting untuk menjamin kesempatan memperoleh pendidikan yang setara (Nuryata et al., 2026).

Pendidikan inklusif menjadi salah satu upaya untuk menjamin kesetaraan akses pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pembelajaran bersama peserta didik lainnya di sekolah reguler (Dewi dkk., 2024). Melalui pendidikan inklusif, peserta didik berkebutuhan khusus diharapkan memperoleh layanan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan inklusi tidak hanya menekankan pada penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi juga membutuhkan kesiapan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta dukungan dari berbagai pihak agar hak pendidikan dapat terpenuhi secara optimal.

Pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Pada tingkat daerah, Pemerintah Kota Surabaya menetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Berbagai regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi di Jawa Timur menunjukkan adanya kebutuhan terhadap penyediaan layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berdasarkan Portal Data Pendidikan Tahun 2026, jumlah siswa berkebutuhan khusus pada jenjang SMP di sekolah inklusi Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2025/2026 mencapai 5.284 siswa, terdiri atas 3.466 siswa di sekolah negeri dan 1.818 siswa di sekolah swasta. Sementara itu, berdasarkan Dataset Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2026, jumlah siswa inklusi pada jenjang SD dan SMP mencapai 3.167 siswa, dengan 855 siswa berada pada jenjang SMP. Adapun di SMP Negeri 48 Surabaya pada tahun ajaran 2026/2027 tercatat sebanyak 15 siswa berkebutuhan khusus yang tersebar pada kelas VII, VIII, dan IX. Untuk memberikan gambaran mengenai jumlah siswa inklusi pada tingkat provinsi, kota, dan sekolah, data tersebut disajikan pada Tabel 1.1

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 7, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

No.	Wilayah/Satuan Pendidikan	Tahun	Jumlah Siswa Inklusi
1.	Provinsi Jawa Timur (SMP)	2025/2026	5.284
2.	Kota Surabaya (SMP)	2026	855
3.	SMP Negeri 48 Surabaya (kelas VII–IX)	2026/2027	15

Sumber : Portal Data Pendidikan, Dataset Dispendik Surabaya, dan SMP Negeri 48 Surabaya, diolah peneliti, 2026

Berdasarkan data tersebut, terdapat 5.284 siswa berkebutuhan khusus pada jenjang SMP di Provinsi Jawa Timur dan 855 siswa pada jenjang yang sama di Kota Surabaya. Sementara itu, SMP Negeri 48 Surabaya memiliki 15 siswa berkebutuhan khusus yang mengikuti pembelajaran di kelas reguler. Perbedaan jumlah tersebut menggambarkan cakupan data pada masing-masing tingkat wilayah dan satuan pendidikan. Keberadaan siswa berkebutuhan khusus di SMP Negeri 48 Surabaya menunjukkan pentingnya pelaksanaan layanan pendidikan inklusi yang mampu memenuhi kebutuhan peserta didik secara individual.

SMP Negeri 48 Surabaya merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri di Kota Surabaya yang menyelenggarakan pendidikan inklusi dengan menempatkan siswa berkebutuhan khusus bersama siswa lainnya dalam kelas reguler. Berdasarkan observasi awal, peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah tersebut memiliki karakteristik yang beragam, di antaranya *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD), *slow learner*, hambatan fisik, serta hambatan pendengaran dan

bicara. Dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi, sekolah mengembangkan Program Sejenak berupa pendampingan pembelajaran individual selama kurang lebih lima hingga sepuluh menit dengan materi yang telah disesuaikan. Selain itu, terdapat Program SEBESTI (Selasa Bersama Sahabat Inklusi) yang bertujuan mengembangkan keterampilan sosial, emosional, komunikasi, dan kemandirian peserta didik melalui berbagai aktivitas edukatif.



Gambar 1.1. Program SEBESTI (Selasa Bersama Sahabat Inklusi)

Sumber : Diolah Peneliti dari SMPN 48 Surabaya, 2026

Meskipun telah melaksanakan berbagai program pendukung, implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMP Negeri 48 Surabaya masih menghadapi sejumlah kendala. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal pada 17 September 2026, sekolah belum memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK) dengan latar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB), sehingga pendampingan siswa berkebutuhan khusus masih dilakukan oleh guru Bimbingan dan Konseling (BK). Selain itu, sarana dan prasarana sekolah belum sepenuhnya mendukung aksesibilitas peserta

didik penyandang disabilitas, terutama bagi siswa dengan hambatan fisik yang harus mengakses ruang kelas di lantai atas. Keterbatasan anggaran khusus pendidikan inklusi juga menyebabkan penyediaan sejumlah media pembelajaran masih diupayakan secara mandiri oleh guru. Sebagaimana disampaikan narasumber :

> "Kalau yang fisik itu dia masih bisa jalan, cuma kelasnya di lantai tiga jadi tetap naik tangga. Kalau dukungan finansial juga tidak ada, untuk anggaran inklusi kita tidak punya. Jadi media pembelajaran sering beli sendiri, bikin media sendiri pakai uang pribadi." (Wawancara, 17 September 2026, Guru B).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi masih menghadapi kesenjangan antara ketentuan kebijakan dan kesiapan sumber daya pada tingkat satuan pendidikan.

Penelitian terdahulu oleh (Maulida dan Suparti 2026) menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar masih menghadapi kendala sumber daya, sarana dan prasarana, serta dukungan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, (Taufik dan Rahaju 2021) mengkaji implementasi pendidikan inklusif pada jenjang SMA di Kota Surabaya dan menemukan bahwa pemerataan layanan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pendidikan inklusi dalam pemenuhan hak pendidikan siswa berkebutuhan khusus pada jenjang SMP, khususnya di SMP Negeri 48 Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi di tingkat sekolah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusi dalam pemenuhan hak pendidikan siswa berkebutuhan khusus di SMP Negeri 48 Surabaya. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pendidikan inklusi dilaksanakan, mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaannya, serta memahami upaya sekolah dalam menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak sekolah dan pemerintah daerah dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan inklusi agar hak pendidikan siswa berkebutuhan khusus dapat terpenuhi secara setara dan nondiskriminatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusi dalam pemenuhan hak pendidikan siswa berkebutuhan khusus di SMP Negeri 48 Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 48 Surabaya dengan informan penelitian yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, meliputi Kepala Sekolah, Guru Bimbingan dan Konseling (BK), guru mata pelajaran, serta siswa berkebutuhan khusus. Fokus penelitian mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pelaksanaan pendidikan inklusi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen sekolah, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dengan didukung pedoman wawancara, pedoman observasi, dan alat dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019), yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Implementasi Pendidikan Inklusi di SMP Negeri 48 Surabaya

SMP Negeri 48 Surabaya merupakan salah satu satuan pendidikan menengah pertama negeri di Kota Surabaya yang menyelenggarakan pendidikan inklusi sebagai bentuk implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus. Penyelenggaraan pendidikan inklusi tersebut merujuk pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya.

Melalui kebijakan tersebut, sekolah memberikan kesempatan kepada siswa berkebutuhan khusus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran bersama siswa reguler dalam lingkungan pendidikan yang sama. Berdasarkan data sekolah tahun ajaran 2026/2027, terdapat 15 siswa berkebutuhan khusus yang tersebar pada kelas VII, VIII, dan IX. Siswa tersebut memiliki karakteristik kebutuhan yang beragam, antara lain Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), slow learner, hambatan fisik, serta hambatan ganda berupa gangguan pendengaran dan bicara. Keberagaman tersebut menuntut adanya penyesuaian layanan pembelajaran dan pendampingan agar setiap siswa dapat memperoleh kesempatan belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, SMP Negeri 48 Surabaya mengembangkan beberapa bentuk layanan pendampingan, yaitu Program Sejenak dan Program SEBESTI (Selasa Bersama Sahabat Inklusi). Program Sejenak merupakan bentuk pendampingan individual yang dilakukan guru selama kurang lebih lima hingga sepuluh menit di dalam kelas reguler melalui pemberian materi pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Sementara itu, Program SEBESTI dilaksanakan melalui kegiatan edukatif dan keterampilan sehari-hari, seperti mencuci pakaian, melipat pakaian, memasak sederhana, mewarnai, serta permainan edukatif. Program tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan kemampuan sosial, emosional, komunikasi, dan kemandirian siswa berkebutuhan khusus. Keberadaan kedua program ini menunjukkan adanya upaya sekolah dalam menyediakan layanan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga memperhatikan pengembangan keterampilan dan kebutuhan individual siswa.

Meskipun telah menyelenggarakan berbagai layanan pendidikan inklusi, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, SMP Negeri 48 Surabaya belum memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK) dengan latar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB), sehingga pendampingan siswa berkebutuhan khusus masih dilaksanakan oleh Guru Bimbingan dan Konseling (BK). Selain itu, kompetensi pendamping dalam menangani kebutuhan tertentu, seperti penggunaan bahasa isyarat, masih terbatas.

Kendala lainnya berkaitan dengan belum tersedianya anggaran khusus pendidikan inklusi serta sarana dan prasarana sekolah yang belum sepenuhnya ramah bagi siswa penyandang disabilitas, terutama akses menuju ruang kelas di lantai atas dan fasilitas kamar mandi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusi di SMP Negeri 48 Surabaya telah diwujudkan melalui penyediaan akses pendidikan dan program pendampingan, tetapi masih memerlukan penguatan sumber daya manusia, dukungan pembiayaan, dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.

4.2 Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Siswa Berkebutuhan Khusus Di Smp Negeri 48 Surabaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMP Negeri 48 Surabaya pada aspek komunikasi telah berjalan melalui penyampaian informasi mengenai peserta didik berkebutuhan khusus dari pihak sekolah kepada guru bimbingan konseling (BK) serta koordinasi dengan guru kelas. Namun, efektivitas komunikasi belum sepenuhnya merata pada tingkat operasional, khususnya dalam hal pemahaman guru kelas yang belum memiliki kemampuan dasar untuk mendampingi peserta didik inklusif di dalam kelas. Hal ini terlihat dari guru mata pelajaran yang masih mengalami kesulitan dalam menangani siswa dengan kebutuhan belajar yang berbeda serta belum memahami secara menyeluruh pedoman pelaksanaan pendidikan inklusi. Selain itu, koordinasi pendampingan masih banyak dilakukan berdasarkan permasalahan yang muncul selama pembelajaran, sehingga penanganan siswa

bergantung pada inisiatif guru dan bantuan dari guru BK.

Pada aspek sumber daya, penelitian menemukan bahwa keterbatasan tenaga pendamping khusus dan kompetensi guru menjadi tantangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. belum tersedianya Guru Pendamping Khusus (GPK) yang memiliki latar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB). Akibatnya, pendampingan peserta didik berkebutuhan khusus masih dilaksanakan oleh Guru Bimbingan dan Konseling (BK) sesuai dengan penugasan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Selain itu, Guru BK juga mengakui bahwa kompetensi dalam menangani peserta didik dengan kebutuhan khusus tertentu, seperti hambatan pendengaran dan penggunaan bahasa isyarat, masih dipelajari secara mandiri karena belum memiliki keahlian khusus di bidang tersebut. Dari aspek disposisi pelaksana, guru menunjukkan sikap positif melalui kesediaan memberikan bantuan, melakukan pendekatan individual, serta mendampingi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Namun, keterbatasan waktu menyebabkan kegiatan pendampingan belum dapat dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam interaksi sosial antar peserta didik, termasuk perilaku fisik yang dilakukan oleh sebagian teman sebaya terhadap siswa inklusi.

Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan pendidikan inklusi telah didukung oleh keterlibatan guru mata pelajaran, guru BK, serta keberadaan Program Sejenak dan SEBESTI (Selasa Bersama Sahabat Inklusi). Akan tetapi, pemahaman mengenai prosedur operasional pendidikan inklusi belum sepenuhnya merata sehingga pelaksanaan pendampingan masih bergantung pada inisiatif masing-masing guru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusi di SMP Negeri 48 Surabaya telah diwujudkan melalui berbagai bentuk layanan pembelajaran dan pendampingan, tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

Implementasi kebijakan pendidikan inklusi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kesempatan dan pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan di sekolah reguler, tetapi juga mendorong terselenggaranya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik masing-masing siswa.

Di Kota Surabaya, penyelenggaraan pendidikan inklusi didukung oleh Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya. Salah satu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi adalah SMP Negeri 48 Surabaya, yang memberikan layanan pembelajaran di kelas reguler serta menyediakan program pendampingan melalui Sejenak dan SEBESTI. Untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980). Menurut Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat variabel utama yang saling berkaitan, yaitu komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi atau sikap pelaksana (disposition), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Keempat variabel tersebut digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi di SMP Negeri 48 Surabaya sebagai berikut.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 7, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

1. **Komunikasi**

   Berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (1980), komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMP Negeri 48 Surabaya. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup tiga indikator, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi informasi mengenai peserta didik berkebutuhan khusus telah dilakukan melalui penyampaian informasi dari pihak sekolah kepada guru Bimbingan dan Konseling (BK), serta koordinasi dengan guru mata pelajaran. Penyampaian informasi tersebut bertujuan agar guru mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas reguler. Namun, penyampaian informasi belum sepenuhnya menjangkau pemahaman seluruh pelaksana di tingkat operasional. Hal ini terlihat dari masih adanya guru mata pelajaran yang mengalami kesulitan dalam menangani peserta didik dengan karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transmisi informasi telah berlangsung, tetapi belum sepenuhnya memastikan kesiapan seluruh guru dalam melaksanakan pendidikan inklusi.

   Dari aspek kejelasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pelaksana terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi masih belum merata. Guru mata pelajaran belum sepenuhnyamemahami pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi, khususnya mengenai cara memberikan pembelajaran dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam pelaksanaannya, guru masih menghadapi kesulitan ketika harus menyesuaikan penyampaian materi dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Kondisi ini juga berkaitan dengan keterbatasan kompetensi guru dalam menangani kebutuhan khusus tertentu, seperti peserta didik dengan hambatan pendengaran yang memerlukan penggunaan bahasa isyarat. Oleh karena itu, informasi mengenai kebijakan pendidikan inklusi perlu disertai penjelasan teknis dan penguatan pemahaman bagi guru agar dapat diterapkan secara tepat dalam kegiatan pembelajaran.

   Sementara itu dari aspek konsistensi, pelaksanaan komunikasi dan koordinasi pendidikan inklusi di SMP Negeri 48 Surabaya masih menghadapi tantangan. Koordinasi antara guru mata pelajaran dan guru BK telah dilakukan untuk membantu menangani kesulitan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus. Namun, berdasarkan hasil penelitian, koordinasi pendampingan masih banyak dilakukan ketika muncul permasalahan selama proses pembelajaran. Akibatnya, pelaksanaan pendampingan belum sepenuhnya berjalan secara terencana dan berkelanjutan serta masih bergantung pada inisiatif masing-masing guru. Keberadaan Program Sejenak dan SEBESTI (Selasa Bersama Sahabat Inklusi) menunjukkan adanya upaya sekolah dalam memberikan layanan pendampingan kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Meskipun demikian, diperlukan koordinasi yang lebih konsisten serta pemahaman yang selaras di antara seluruh guru agar pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi dapat berjalan secara berkesinambungan.

   Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMP Negeri 48 Surabaya telah dilaksanakan melalui penyampaian informasi dan koordinasi antara pihak sekolah, guru BK, dan guru mata pelajaran. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan pemahaman guru terhadap pedoman pendidikan inklusi, kesulitan dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, serta koordinasi pendampingan yang cenderung dilakukan ketika permasalahan muncul. Oleh karena itu, diperlukan penyampaian informasi yang lebih menyeluruh, penjelasan teknis yang mudah dipahami, dan koordinasi yang konsisten agar seluruh pelaksana memiliki pemahaman yang sama dalam memenuhi hak pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus.

2. **Sumber Daya**

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 7, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Menurut George C. Edwards III (1980), sumber daya merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi mencakup ketersediaan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, anggaran, serta kewenangan. Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 48 Surabaya, salah satu kendala pada aspek SDM adalah belum tersedianya Guru Pendamping Khusus (GPK). Pendampingan siswa berkebutuhan khusus masih dilakukan oleh guru BK dengan dukungan guru mata pelajaran sesuai kebutuhan siswa inklusi. Kondisi ini menjadi tantangan bagi sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar siswa berkebutuhan khusus. Berdasarkan data sekolah tahun ajaran 2026/2027, terdapat 15 siswa berkebutuhan khusus yang tersebar di kelas VII, VIII, dan IX dengan karakteristik kebutuhan yang beragam, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel : 2 Sebaran Siswa Inklusif Berdasarkan Jenis Tahun Ajaran 2026/2027

Tingkat Kelas	Jumlah Siswa
VII	7
VIII	4
IX	4
Total	15

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan data SMP Negeri 48 Surabaya, 2026

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa siswa berkebutuhan khusus tersebar pada tiga tingkat kelas reguler, dengan jumlah terbanyak berada di kelas VII. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya dukungan sumber daya yang dapat mengakomodasi kebutuhan belajar siswa pada setiap tingkat kelas. Kebutuhan tersebut menjadi penting karena siswa berkebutuhan khusus memiliki karakteristik dan kemampuan belajar yang beragam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Bimbingan dan Konseling (BK) menunjukkan bahwa sekolah belum memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK). Pendampingan siswa berkebutuhan khusus masih dilakukan oleh guru BK dengan dukungan guru mata pelajaran sesuai kebutuhan siswa. Guru BK menyatakan "belum ada guru khusus yang menangani siswa inklusi" dan menegaskan bahwa "Sambil belajar, lihat di internet gimana cara menangani anak ini. Sharing juga di sekolah lain." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa guru BK memahami aspek psikologis dan sosial-emosional siswa, tetapi masih perlu mempelajari penanganan kebutuhan tertentu, seperti penggunaan bahasa isyarat. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, guru BK berupaya belajar secara mandiri melalui internet dan YouTube serta bertukar pengalaman dengan pihak lain. Temuan ini menunjukkan bahwa sekolah telah memanfaatkan tenaga yang tersedia untuk memberikan layanan pendampingan, tetapi keberadaan tenaga dengan kompetensi khusus masih menjadi kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Keterbatasan sumber daya manusia juga berkaitan dengan kompetensi guru mata pelajaran dalam mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus. Berdasarkan hasil wawancara, guru mata pelajaran telah berupaya menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan peserta didik, antara lain melalui penggunaan angka yang lebih sederhana, gambar, serta alat tulis berwarna untuk meningkatkan perhatian peserta didik. Namun, guru tersebut menyatakan belum pernah mengikuti pelatihan khusus mengenai penanganan peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini ditegaskan oleh guru mata pelajaran dengan pernyataan, "Saya tidak pernah mengikuti pelatihan sama sekali apa karena saya tidak tahu atau bagaimana tetapi saya tidak pernah".

Sementara itu, guru BK menyampaikan bahwa pelatihan pendidikan inklusi pernah diselenggarakan oleh pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan. Beliau menjelaskan, "Dinas itu biasanya mengadakan pelatihan dan sosialiasi,". Guru BK juga menyebutkan bahwa

pelatihan tersebut tidak hanya ditujukan kepada guru BK, tetapi mencakup guru lainnya. Perbedaan pernyataan kedua informan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pelatihan pendidikan inklusi telah diselenggarakan, kesempatan mengikuti pelatihan dan pendampingan belum dirasakan secara merata oleh guru yang terlibat dalam pembelajaran.

Pada aspek sarana dan prasarana, sekolah telah menyediakan ruangan untuk pendampingan serta menggunakan media pembelajaran sederhana yang disiapkan berdasarkan kebutuhan siswa. Guru BK dan guru mata pelajaran berupaya menyesuaikan media dengan kemampuan siswa, tetapi penyediaannya masih bergantung pada inisiatif masing-masing guru. Selain itu, sekolah juga belum memiliki anggaran khusus untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif sehingga kebutuhan media pembelajaran dan pendampingan masih diupayakan secara mandiri oleh guru. Temuan ini memperlihatkan adanya dukungan pembelajaran, tetapi belum cukup untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan fasilitas dan aksesibilitas siswa telah terpenuhi.

3. Disposisi

Dalam teori George C. Edwards III, disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dalam konteks pendidikan inklusi, disposisi dapat dilihat dari bagaimana guru menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan siswa, kesediaan menyesuaikan metode pembelajaran, serta sikap menerima keberagaman kemampuan peserta didik.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat upaya yang dilakukan oleh guru mata pelajaran untuk mendekati dan membantu siswa yang berkebutuhan khusus ketika mereka mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru tidak hanya mengandalkan jawaban tertulis, tetapi juga membacakan pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab secara lisan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat usaha untuk memahami kebutuhan siswa dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran agar siswa dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran.

Selain menunjukkan kepedulian melalui penyesuaian pembelajaran, guru juga berupaya memberikan pendampingan ketika menghadapi siswa yang mengalami perubahan emosi atau perilaku. Dalam situasi tersebut, guru berusaha menenangkan siswa dan melibatkan pihak lain apabila permasalahan yang dihadapi memerlukan penanganan lebih lanjut. Upaya tersebut menunjukkan bahwa adanya kemauan untuk mendampingi siswa sesuai dengan kebutuhannya, tetapi terdapat pengakuan dari guru bahwa mereka belum sepenuhnya memiliki keahlian khusus untuk menangani seluruh karakteristik siswa berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, pendampingan yang diberikan masih disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

Adanya kepedulian tersebut juga turut dirasakan oleh siswa inklusi. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara bahwa, siswa menyampaikan guru bersikap baik dan bersedia membantu ketika mereka mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Keterangan ini menunjukkan adanya dukungan dari guru selama kegiatan belajar berlangsung. Dengan demikian, sikap positif guru tidak hanya terlihat dari upaya yang dilakukan dalam proses pembelajaran, tetapi juga tercermin dari pengalaman siswa ketika memperoleh bantuan dan pendampingan di sekolah.

Meskipun demikian, kemauan guru untuk membantu siswa belum sepenuhnya diikuti dengan pendampingan yang konsisten. Guru mengungkapkan bahwa perhatian terhadap siswa berkebutuhan khusus terkadang terbatas karena harus membagi waktu dan perhatian dengan siswa lain dalam kelas yang sama. Akibatnya, dalam kondisi tertentu, kebutuhan siswa inklusi dapat terlewatkan. Kondisi ini menunjukkan adanya sikap positif dan kemauan untuk membantu, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala dalam memberikan perhatian yang sesuai bagi setiap siswa.

Di samping itu, penerimaan terhadap siswa berkebutuhan khusus juga perlu dilihat dari hubungan sosial mereka dengan teman sebaya. Berdasarkan hasil wawancara, siswa menyampaikan bahwa sebagian teman bersikap baik, tetapi terdapat pula teman yang

melakukan tindakan fisik, seperti memukul. Temuan ini menunjukkan penerimaan terhadap siswa inklusi belum sepenuhnya terwujud dalam lingkungan pergaulan di sekolah. Oleh karena itu, disposisi dalam pelaksanaan pendidikan inklusi tidak hanya berkaitan dengan sikap guru sebagai pelaksana pembelajaran, tetapi juga perlu memperhatikan bagaimana lingkungan sekolah membangun sikap saling menghargai dan memperlakukan siswa berkebutuhan khusus secara adil.

Berdasarkan hasil penelitian, disposisi dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMP Negeri 48 Surabaya menunjukkan bahwa guru telah memiliki kemauan untuk membantu siswa, menyesuaikan pendekatan pembelajaran, dan memberikan pendampingan ketika siswa mengalami kesulitan. Namun, kemauan tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara optimal karena keterbatasan kompetensi dan waktu yang memengaruhi pendampingan. Selain itu, masih ditemukannya tindakan fisik dari teman sebaya menunjukkan bahwa penerimaan terhadap siswa berkebutuhan khusus perlu diperkuat di lingkungan sekolah. Dengan demikian, pelaksanaan disposisi dalam pendidikan inklusi tidak cukup hanya ditunjukkan melalui sikap positif guru, tetapi juga perlu didukung oleh kemampuan memberikan pendampingan secara berkelanjutan serta terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menghargai keberagaman siswa.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu variabel dalam teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang berkaitan dengan pembagian tugas, prosedur kerja, dan koordinasi antarpelaksana kebijakan. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, struktur birokrasi dapat dilihat melalui pembagian tanggung jawab antara guru mata pelajaran dan guru BK, mekanisme pendampingan siswa, serta pelaksanaan program yang mendukung kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan pendidikan inklusi di SMP Negeri 48 Surabaya melibatkan guru mata pelajaran, guru BK, wali kelas, dan pihak sekolah. Guru mata pelajaran bertanggung jawab melaksanakan pembelajaran di kelas reguler, sedangkan guru BK membantu memberikan pendampingan ketika siswa mengalami kesulitan belajar maupun permasalahan perilaku. Koordinasi antarguru dilakukan melalui komunikasi langsung maupun pesan pribadi untuk menyampaikan kondisi dan permasalahan siswa. Namun, pembagian tanggung jawab tersebut masih menyesuaikan situasi yang dihadapi karena sekolah belum memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK).

Dalam pelaksanaannya, sekolah juga memiliki mekanisme identifikasi siswa berkebutuhan khusus yang dilakukan melalui wawancara dengan orang tua, komunikasi dengan sekolah asal, serta hasil tes kemampuan siswa. Informasi tersebut digunakan untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan siswa sebagai dasar pemberian layanan. Guru BK kemudian berkoordinasi dengan wali kelas dan guru mata pelajaran agar pendampingan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing siswa. Selain itu, sekolah juga mengadakan pertemuan dengan orang tua pada awal tahun ajaran untuk menyampaikan informasi mengenai program pendidikan inklusi.

Salah satu bentuk pendampingan yang dilaksanakan adalah Program Sejenak. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran, program ini dilakukan dengan memberikan perhatian secara individual kepada siswa berkebutuhan khusus setelah penyampaian materi kepada seluruh kelas. Guru dapat memberikan penjelasan tambahan, membantu menyelesaikan tugas, atau mengajak siswa berkomunikasi sesuai kebutuhannya. Namun, pemahaman guru mengenai mekanisme pelaksanaan Program Sejenak belum sepenuhnya jelas sehingga pendampingan masih dilakukan berdasarkan kemampuan dan inisiatif masing-masing guru.

Selain itu, sekolah menyelenggarakan Program SEBESTI (Selasa Bersama Sahabat Inklusi)

sebagai kegiatan pendukung bagi siswa berkebutuhan khusus. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK, program tersebut dilaksanakan secara berkala dengan pembagian tugas pendampingan secara bergantian berdasarkan jenjang kelas. Kegiatan yang diberikan mencakup pengenalan angka dan huruf, pengembangan Keterampilan hidup, serta aktivitas sosial. Hasil wawancara dengan siswa berkebutuhan khusus juga menunjukkan bahwa mereka mengikuti kegiatan belajar dan bermain, termasuk aktivitas olahraga di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa program sekolah tidak hanya berfokus pada pembelajaran akademik, tetapi juga mendukung pengembangan keterampilan dan interaksi sosial siswa.

Meskipun mekanisme pendampingan dan program pendidikan inklusi telah dilaksanakan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) belum sepenuhnya merata. Guru mata pelajaran menyampaikan bahwa dirinya belum mengetahui secara jelas pedoman pelaksanaan pendidikan inklusi sehingga pendampingan dilakukan berdasarkan pengalaman, kemampuan, dan kondisi siswa. Sementara itu, guru BK telah menjalankan mekanisme identifikasi, perencanaan layanan, serta koordinasi dengan pihak terkait. Perbedaan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa penyampaian prosedur dan pembagian tanggung jawab masih perlu diperkuat agar pelaksanaan layanan lebih konsisten.

Berdasarkan hasil penelitian, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMP Negeri 48 Surabaya telah terlihat melalui pembagian peran antara guru mata pelajaran dan guru BK, mekanisme identifikasi siswa, serta pelaksanaan Program Sejenak dan SEBESTI. Namun, belum tersedianya GPK dan belum meratanya pemahaman guru mengenai SOP menunjukkan bahwa pelaksanaan struktur birokrasi belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, kejelasan pembagian tugas, serta penyampaian pedoman pelaksanaan yang lebih merata agar layanan pendidikan inklusi dapat berjalan secara terarah, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusi dalam pemenuhan hak pendidikan siswa berkebutuhan khusus di SMP Negeri 48 Surabaya telah dilaksanakan melalui penyelenggaraan pembelajaran di kelas reguler serta berbagai layanan pendampingan, seperti Program Sejenak dan SEBESTI (Selasa Bersama Sahabat Inklusi). Pelaksanaan pendidikan inklusi tersebut mengacu pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya. Meskipun demikian, implementasinya masih belum sepenuhnya optimal.

Dianalisis berdasarkan model implementasi kebijakan George C. Edward III, pada aspek komunikasi, penyampaian informasi dan koordinasi antara guru BK dengan guru mata pelajaran telah dilakukan. Namun, pemahaman guru mengenai pedoman dan teknis pembelajaran inklusi masih belum merata. Pada aspek sumber daya, pelaksanaan pendidikan inklusi masih menghadapi keterbatasan, terutama belum tersedianya Guru Pendamping Khusus (GPK), keterbatasan kompetensi pendamping dalam menangani kebutuhan khusus tertentu, belum adanya anggaran khusus, serta sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya ramah disabilitas.

Pada aspek disposisi, pihak sekolah dan guru telah menunjukkan komitmen dalam memberikan layanan kepada siswa berkebutuhan khusus melalui pendampingan dan penyesuaian pembelajaran. Namun, keterbatasan kemampuan serta waktu guru menyebabkan pendampingan belum dapat dilakukan secara konsisten. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, pembagian peran antara guru BK dan guru mata pelajaran serta pelaksanaan Program Sejenak dan SEBESTI telah mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi. Akan tetapi, pemahaman mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) belum merata sehingga pelaksanaan pendampingan masih bergantung pada inisiatif masing-masing guru.

Oleh karena itu, kebijakan pendidikan inklusi di SMP Negeri 48 Surabaya telah diupayakan

melalui berbagai layanan pendidikan, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi agar pemenuhan hak pendidikan siswa berkebutuhan khusus dapat terlaksana secara lebih optimal.

SARAN

1. Pihak sekolah diharapkan meningkatkan koordinasi dan sosialisasi internal mengenai kebijakan pendidikan inklusi, khususnya terkait pedoman teknis pembelajaran dan pendampingan siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, diperlukan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan pendidikan inklusi agar seluruh guru memiliki pemahaman yang sama dalam memberikan layanan pembelajaran.
2. Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Pendidikan diharapkan memberikan dukungan lebih lanjut melalui penyediaan Guru Pendamping Khusus (GPK) yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan siswa, dukungan anggaran, serta peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas. Hal ini diperlukan agar sekolah dapat memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing siswa berkebutuhan khusus.
3. Pihak sekolah perlu memperjelas pembagian tugas dan mekanisme pelaksanaan pendidikan inklusi melalui penyusunan atau penyampaian SOP yang mudah dipahami oleh seluruh guru. Selain itu, pelaksanaan Program Sejenak dan SEBESTI perlu ditingkatkan secara konsisten serta disertai evaluasi berkala agar layanan pendampingan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Amka, H. (2025) Pendidikan Inklusif (Dari Teori Ke Aksi).

Cuoco, A. et al. (no date) “and cultures : challenges for inclusiveness and rigour Designing and conducting qualitative research across countries and cultures : challenges for inclusiveness and rigour,” European Journal of Cardiovascular Nursing, 21(8),

Dan, T. et al. (2019) “WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR,” pp. 1–5.

Dedi, D. (2025) “Evaluasi Penerapan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif: Kasus Kepatuhan di Jawa Timur Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016,” Jurnal Edukasi, Volume 11 No.1, 11(1), pp. 60–84.

Dewi, W.P. and Fadlullah, S. (2024) “Implementasi Pendidikan Inklusif pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Jenjang SMP di Kota Tangerang,” 5(1), pp. 643–650.

Dianasari, Astuti, M. (2025) “PERAN GURU DALAM MENCIPTAKANLINGKUNGAN PEMBELAJARAN YANG MENDUKUNG PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK DI SEKOLAH INKLUSIF SD MUHAMM1ADIYAH 6

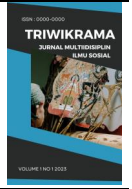
SURABAYA Dianasari1,” 10.

Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press

Fadli, M.R. (2021) “Memahami desain metode penelitian kualitatif,” 21(1), pp. 33–54. Available at: https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.

Hidayat Rahmat, Ulfatmi, Afnibar, K. (2023) “Konseling Anak Berkebutuhan Khusus,” Sultra Educational Journal (Seduj), 3(3).

Hilmiati, A.T.K. dan (2025) “JURNAL PENDIDIKAN INKLUSI Citra Bakti Latar Belakang Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara tanpa terkecuali , termasuk,” 3, pp. 210–220.



Ika, L. (2021) "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling," HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, 6(1), pp. 33–39.

In, L. and Regency, G. (2017) "IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION FOR JUNIOR HIGH SCHOOL," 11(1), pp. 15–25.

Indonesia, P.R. (2016) "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS."

Jihan, A. et al. (2026) "Aksesibilitas dan Rasa Keadilan Siswa Berkebutuhan Khusus di SMP Negeri 15 Semarang," (April).

Khairuddin (2020) "Pendidikan Inklusif di Lembaga Pendidikan," IX(1), pp. 82–104.

Manalu, Y.R. (2025) "Pentingnya Pendidikan Bagi Kehidupan Dan Pendidikan Karakter Dalam Dunia Pendidikan," pp. 81–87.

Mardiansah, Ramadhan, R.A. et al. (2024) "Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus dan Klasifikasinya," 5(1).

Nuryata Renita, Yudistira Zakia, Dewi Ratna, R.N. (2026) "Jurnal Pendidikan Multidisipliner," 9, pp. 48–58.

Phytanza, Diajeng, Nur Ridwan, Hasyim, M. (2023) PENDIDIKAN INKLUSIF :KONSEP, IMPLEMENTASI DAN TUJUAN.

Pradisty, N. (2024) "Karakteristik dan Pendidikan Inklusi Anak Berkebutuhan Khusus," 2(1), pp. 18–23.

Provinsi, W. (2022) "PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA SURABAYA," 2019.

Rahaju, A.N.T. dan T. (2018) "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif … IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK MEWUJUDKAN SMA DI SURABAYA Achmad Nur Taufik Tjitjik Rahaju," pp. 139–154.

Rahaju, R.S. dan T. (2018) "EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA SURABAYA," pp. 109–124.

Rahma, S.I. et al. (2026) "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF SEBAGAI BENTUK PENDIDIKAN NON-DISKRIMINATIF DI SDN KLAMPIS NGASEM I / 246 SURABAYA SEBAGAI BENTUK PENDIDIKAN NON-DISKRIMINATIF DI SDN," 4(7).

Rahardian, R. (2024). Teori-teori governansi dan kebijakan publik kontemporer. BRIN. https://doi.org/10.55981/brin.998

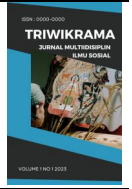
Rismawan, R.M. et al. (2026) "Implementasi Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Inklusif Di SD Negeri Gayungan II / 423 Kota Surabaya," pp. 6976–6989.

Rosari, U.S., Sholichah, N. and Ferriswara, D. (2023) "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Kota Surabaya Ursula Susanti Rosari, Nihayatus Sholichah, Dian Ferriswara," 1(2), pp. 81–94.

Sam, R., Nasrullah, P. and Soesiantoro, A. (2025) "Implementasi Program Pendidikan Inklusif untuk Kesetaraan Pendidikan Kota Surabaya," 5(03), pp. 128–138.

Sudarto, Z. et al. (2020) "ANALYSIS OF IMPLEMENTATIONS," 4, pp. 37–42.

Suharsiwi (2023) Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Sulfiani, B. dan S. (2025) "Pendidikan Inklusif



: Teori, Model dan Aplikasi."

Suparti, M. dan (2026) "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Di SDN 1.2 Belimbing Raya Nor," JAPB, 9, pp. 341–352. Available at: https://doi.org/. 10.35722/japb.

Surabaya, W. (2024) "PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN BAGI DISABILITAS DI KOTA SURABAYA."

T, Etna Anjani, Yuwono imam, R. (2025) "Pendidikan Inklusif dalam Perspektif Ekologi," CV Bravo Press Indonesia, p. 177.

Widhiarti, F.N. and Chasanah, C. (2024) "Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan Inklusi terhadap Prestasi Belajar Siswa Berkebutuhan Khusus di SD Negeri 1 Bocor," Social, Humanities and Educational Studies, 7(3), pp. 572–579.